



**LAPORAN TAHUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

2025



**Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat yang telah dilimpahkanNya, sehingga Laporan Tahunan Program dan Kegiatan Lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan TA 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Laporan tahunan ini telah disusun secara rutin dan berkesinambungan, namun saran dan kritik yang membangun diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang.

Laporan Tahunan 2025 menyajikan laporan kegiatan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP). Laporan Tahunan ini membahas, program penyuluhan kelautan dan perikanan serta program manajeral. Saya berharap semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai dan hal positif di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan selama TA 2025, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah perumusan kebijakan kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan perumusan kebijakan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih memperbanyak kegiatan - kegiatan yang inovatif di masa yang akan datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Gondol, 31 Desember 2025
Plt. Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan
Penyuluhan Perikanan Gondol



Wawan Andriyanto, S.Pi. M.Sc
NIP. 19780502 200502 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Target utama RPJMN 2025-2029 adalah tiga sasaran pembangunan nasional yaitu penurunan kemiskinan menjadi 4,5-5%, peningkatan kualitas sumber daya manusia (melalui Indeks Modal Manusia 0,59%), dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (target 8% pada 2029). Sasaran ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan berfokus pada penguatan SDM, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program- program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) dan tanggung jawab pemakaian dana, sumber daya dan sarana serta prasarana dari pemerintah untuk menjalankan visi dan misi BBRBLPP.

Pengukuran capaian kinerja BBRBLPP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* (LFA) dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRBLPP di tingkat korporat tahun 2025 sebesar 113,01%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kinerjaku Home

Senin, 19 Januari 2026

Unit:

BALAI BESAR RISET BUDI DAYA LAUT DAN PENYULUHAN

Tahun:

2025

Tampilkan



Sumber : Aplikasi Kinerjaku

Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRBLPP

Selama Tahun 2025, dari total 16 (enam belas) IKU terdapat 10 (sepuluh) IKU berstatus biru dan 6 (enam) IKU berstatus hijau. Capaian tersebut akan menjadi catatan evaluasi IKU pada tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan target IKU dan PK pada tahun 2026. Dan kedepannya akan diupayakan agar IKU secara keseluruhan tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Rincian target dan realiasi dari 16 (enam belas) IKU tersebut adalah:

Capaian Kinerja BBRBLPP Tahun 2025

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.140	3.140	3.768	120,00
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98	98	118	120,00
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	359	359	432	120,00
		4	Gabungan kelompok dan/ atau koperasi yang	49	49	60	120,00



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%
			mendapatkan pendampingan dari Penyuluh BBRBLPP (Unit)				
		5	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0,2413	0,2413	0,2518	104,35
		6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1	1	2	120,00
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	1	1	1	100,00
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	10	10	12	120,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)	1	1	2	120,00
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85	85	85	100,00
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92	92	99,96	108,65
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81	81	83,05	102,53
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	72	72	100	120,00
		14	Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (Indeks)	81	81	83,39	102,95
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80	80	100	120,00
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80	80	97,5	120,00

Sumber : Data diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan terdapat 10 IKU yang capaiannya memiliki kategori istimewa atau tercapai lebih dari 110%, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya, namun BBRBLPP tetap melakukan tuis sesuai dengan arahan dan pendanaan dari pusat. Pada kontrak kinerja terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Semua IKU yang telah ditargetkan mampu direalisasikan 100% bahkan beberapa telah tercapai jauh melebihi ekspektasi Balai pada tahun ini. IKU yang capaiannya tertinggi di tahun 2025 adalah IKU 6. Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket) dan IKU 9. Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) dengan realisasi masing - masing sebesar 200% dari target yang ditetapkan, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diberikan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai PNPB Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) berpotensi tidak tercapai selain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran juga disebabkan karena target panen tahap pembesaran tidak dapat terlaksana sampai akhir tahun 2025 karena benih belum mencapai ukuran siap untuk dipanen secara massal.
2. Ketercapaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP terkendala karena:
 - a. Dari 13 orang yang diusulkan untuk ikut Ujikom, terdapat 5 orang tidak bisa mengikuti ujikom disebabkan pendidikannya belum memenuhi syarat yaitu minimal D3;
 - b. Terdapat 1 orang penyuluh telah mengikuti ujikom dan telah lulus tahap I, namun tahap II tidak lulus karena tidak masuk pada perangkingan;
 - c. Sisanya sebanyak 6 orang tidak lulus setelah mengikuti ujian dan hanya 1 orang telah lulus.

Terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diatas, langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh BBRBLPP antara lain adalah :

1. Menata ulang dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) BBRBLPP atau dengan optimalisasi aset yang belum tergarap, melalui sewa atau kerja sama;
2. Melakukan pendampingan (*coaching/mentoring*), simulasi ujian (*tryout*), dan persiapan portofolio kerja, khususnya kepada karyawan yang akan mengikuti Ujian Kompetensi Penyuluh.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BBRBLPP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BBRBLPP. Akhirnya, BBRBLPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. Pendahuluan.....	45
1.1. Latar Belakang.....	45
1.2. Maksud dan Tujuan.....	46
1.3. Struktur Organisasi	49
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia	51
1.5. Potensi dan Permasalahan	54
1.6. Sistematika LKj.....	57
BAB II. Metode Pelaksanaan Kegiatan	58
2.1. Rencana Kerja Tahun 2025.....	58
2.2. Perjanjian Kinerja	59
2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	62
2.4. Hasil Pengukuran BBRBLPP	62
BAB III. Permasalahan Dan Rekomendasi	106
3.1. Permasalahan	106
3.2. Rekomendasi.....	106
BAB IV. P e n u t u p	107

BAB I.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Target utama RPJMN 2025-2029 adalah tiga sasaran pembangunan nasional yaitu penurunan kemiskinan menjadi 4,5-5%, peningkatan kualitas sumber daya manusia (melalui Indeks Modal Manusia 0,59%), dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (target 8% pada 2029). Sasaran ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan berfokus pada penguatan SDM, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan.

Sehingga Tiga Sasaran Pembangunan Utama RPJPN tahun 2025-2029 adalah:

1. **Penurunan Kemiskinan:** Menargetkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen pada tahun 2029.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) hingga mencapai 0,59 persen.
3. **Pertumbuhan Ekonomi:** Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen pada tahun 2029.

Selain tiga sasaran utama, RPJMN 2025-2029 juga mencakup:

- **Infrastruktur dan Pembangunan Daerah:** Pembangunan daerah dan penyediaan infrastruktur yang merata.
- **Keberlanjutan Lingkungan Hidup:** Menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan lingkungan.
- **Perkuat SDM Melalui Kesehatan:** Di bidang kesehatan, fokusnya adalah meningkatkan layanan dasar kesehatan, memberikan gizi, dan mengendalikan penyakit untuk mewujudkan SDM berkualitas.
- **Kualitas dan Inklusivitas:** Memastikan pembangunan yang inklusif dan memperhatikan kesetaraan gender.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program- program jangka panjang dan menengah KKP, khususnya program penyuluhan dan SDM KP.

Acuan dalam penyusunan LKj Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja BBRBLPP Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BBRBLPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BBRBLPP guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan manajerial yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) BBRBLPP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja BBRBLPP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BBRBLPP Tahun 2025 ini, bertujuan:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BBRBLPP kepada BPPSDM KP;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan pada Tahun 2025 dan
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tugas, Fungsi BBRBLPP dan Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 797/Kpts/OT.210/12/1994, Loka Penelitian Perikanan Pantai (Lolitskanta) Gondol, memiliki mandat melakukan penelitian perbenihan perikanan Pantai. Dengan bekerjasama pemerintah Jepang melalui proyek JICA ATA-379 selama kurun waktu 11 tahun (tahun 1989 s/d tahun 2000), maka Lolitskanta Gondol telah mengembangkan Multi Species Hatchery dan telah menghasilkan beberapa teknologi perbenihan yang telah diadopsi oleh pengguna, yaitu; perbenihan udang, bandeng, kerapu bebek, kerapu macan dan kerapu lumpur yang kesemuanya telah mampu memproduksi skala masal. Di tahun berikutnya, telah berhasil pula dilakukan perbenihan kepiting bakau, rajungan, kerapu sunu, ikan cobia dan ikan hias.

Pada tanggal 31 Juli 2000, Loka Penelitian Perikanan Pantai (Lolitskanta) Gondol yang awalnya berada dibawah Departemen Pertanian beralih dibawah Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 73 tahun 2000. Kemudian dengan terbentuknya Badan Riset Kelautan dan Perikanan serta Pusat Riset Perikanan Budidaya, maka berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 1 Mei 2001 No. 26A/MEN/2001, Lolitskanta Gondol berubah menjadi Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut (BBRPBL), dan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan tertanggal 26 September 2011 NO. PER 26/MEN/2011 berubah menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut. Selanjutnya berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2018, BBPPBL berubah nama menjadi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluh Perikanan (BBRBLPP). disempurnakan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020, dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang sama, namun struktur organisasi yang lebih sederhana.

Tugas

Tugas pokok BBRBLPP adalah melaksanakan riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan;
- b) pelaksanaan riset budidaya laut dibidang biologi, reproduksi, genetik, bioteknologi, nutrisi dan teknologi pakan, pathologi, ekologi dan lingkungan budidaya laut, serta pengembangan teknologi budidaya laut;
- c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset budidaya laut;
- d) penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha
- e) penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swasta, dan swasta;
- f) pengelolaan prasarana dan sarana riset budidaya laut dan penyuluhan perikanan; dan

g) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Setiap unsur di lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada unit organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b. Kepala Subbagian Umum pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Susunan organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan terdiri atas: Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Lebih lanjut dituangkan dalam Surat Tugas nomor B.2987/BRSDM-BBRBLPP/KP.440/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 tentang penugasan pegawai sebagai Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan yang dibagi menjadi 2 (dua) Tim Kerja yaitu Tim Kerja Penyuluhan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Tenaga fungsional yang saat ini masih ada di BBRBLPP adalah Analis Pengelolaan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analias Kepegawaian, Perencana, Pranata Humas dan Pustakawan.

1.3. Struktur Organisasi

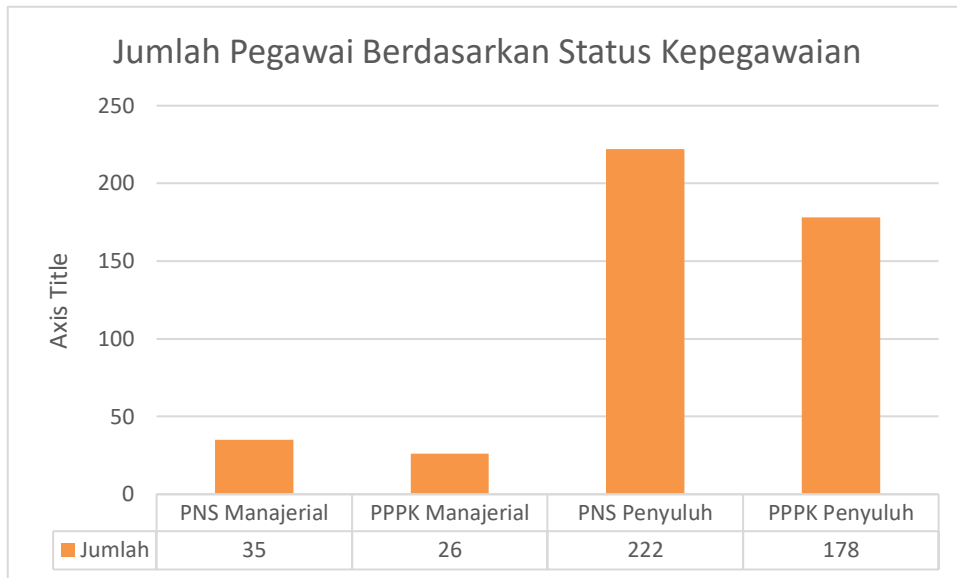
Berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan No.70/PERMEN-KP/2020 tertanggal 30 Desember 2020 di Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Eselon I BRSDM dan dibina secara teknis oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Lebih lanjut lagi dalam Surat Tugas nomor B.2987/BRSDM-BBRBLPP/KP.440/X/2023 tentang penugasan pegawai sebagai Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, maka susunan organisasi BBRBLPP berdasarkan Permen KP Nomor 70 Tahun 2020 tentang OTK BBRBLPP adalah sebagai berikut :



Gambar I. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan

Pada tahun 2023, BBRBLPP membentuk tim kerja yang mengacu pada Surat Sekretaris BRSDM No.B.4546/BRSDM.1/TU.210/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal “Pembentukan Tim Kerja Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 983/SJ.3/OT.210/VI/2023 tentang Penyampaian Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. BBRBLPP memiliki 2 (dua) tim kerja berdasarkan Surat Tugas Kepala BBRBLPP B.2987/BRSDM-BBRBLPP/KP.440/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, yaitu: (1) Tim Kerja Dukungan Manajerial bertugas menyelenggarakan dan mencapai target indikator kinerja pada kegiatan layanan dukungan manajemen Eselon I dan satker, dan (2) Tim Kerja Penyuluhan Perikanan bertugas menyelenggarakan dan mencapai target indikator kinerja pada kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan lingkup BBRBLPP.

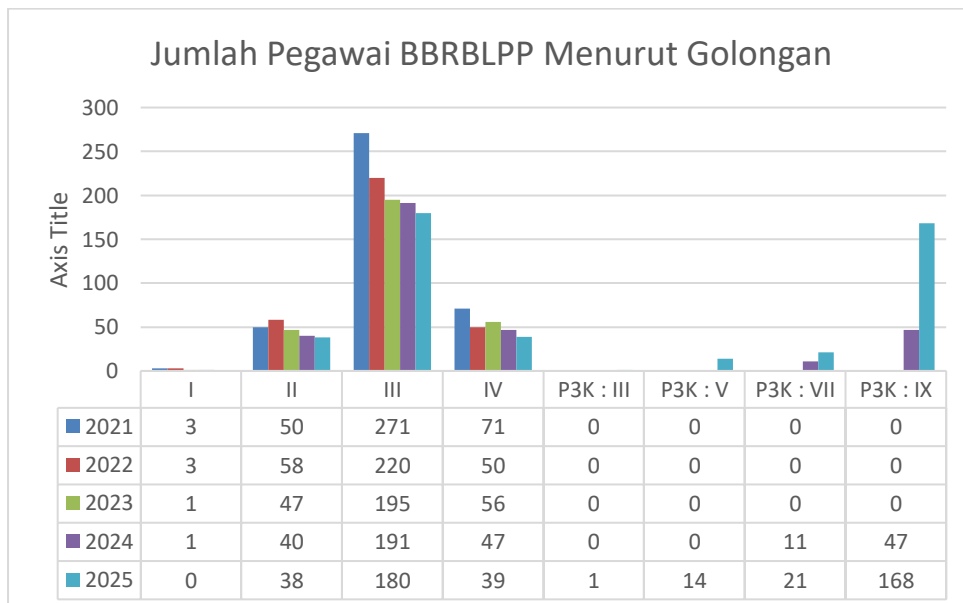
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia



Sumber: Data diolah dari Data Kepegawaian BBRBLPP

Gambar I. 2. Jumlah Pegawai Lingkup BBRBLPP Menurut Status Kepegawaian

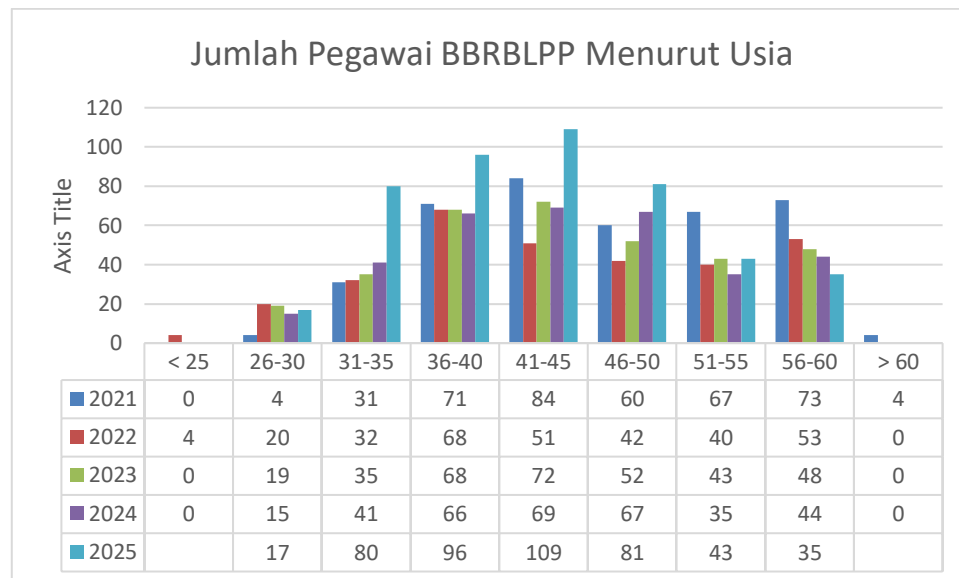
Dari gambar 1.2. di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pegawai menurut status kepegawaian jumlah terbanyak adalah PNS Penyuluh dengan jumlah 222 pegawai, selanjutnya adalah PPPK Penyuluh dengan jumlah 178 pegawai, lalu PNS Manajerial dengan jumlah 35 pegawai dan PPPK Manajerial sebanyak 26 pegawai.



Sumber: Data diolah dari Data Kepegawaian BBRBLPP

Gambar I. 3. Jumlah Pegawai Lingkup BBRBLPP Menurut Golongan

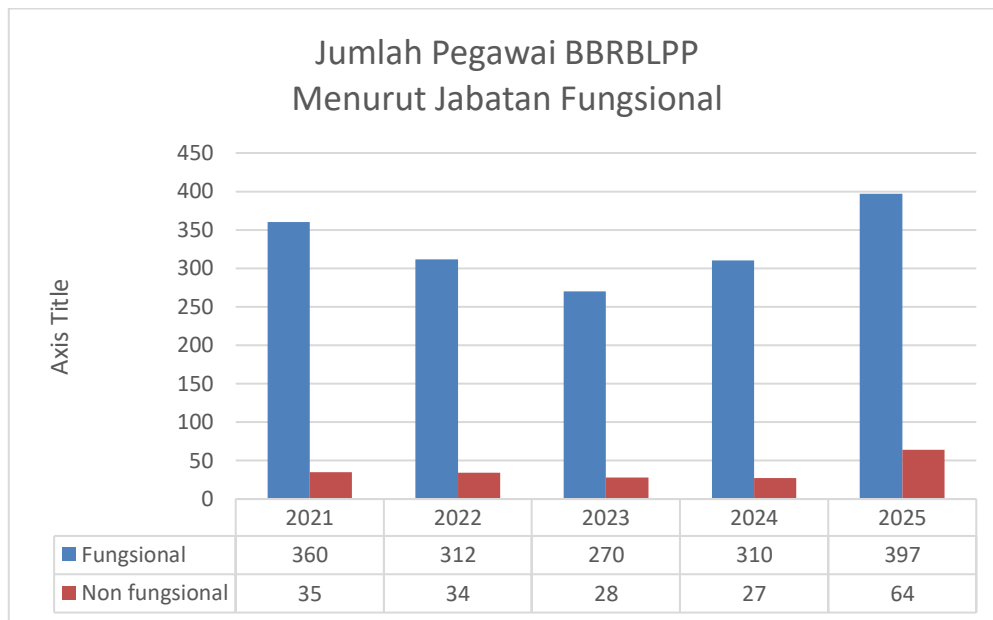
Sesuai dengan gambar 1.3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pegawai menurut golongan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan pegawai dari proses mutasi instansi lain, dan penambahan pegawai yang lulus seleksi PPPK.



Sumber: Data diolah dari Data Kepegawaian BBRBLPP

Gambar I. 4. Jumlah Pegawai Lingkup BBRBLPP Menurut Usia

Sesuai dengan grafik 1.4. di atas, pada tahun 2025 jumlah pegawai BBRBLPP menurut usia didominasi oleh pegawai berusia 41-45 tahun yaitu sebanyak 109 orang, lalu pegawai dengan usia 36-40 tahun sebanyak 96 orang, sedangkan jumlah pegawai yang berusia muda antara 26-30 tahun sebanyak 17 orang. Tabel diatas memperlihatkan bahwa beberapa pegawai di lingkup BBRBLPP pada dasarnya masih didominasi usia yang masih produktif, karena pada tahun 2025 terdapat penambahan tenaga yang lulus seleksi PPPK dan mutasi dari instansi lain. Namun BBRBLPP masih perlu adanya regenerasi pegawai, baik untuk tenaga administrasi maupun tenaga di lapangan dengan usia muda karena disetiap tahunnya terdapat beberapa pegawai yang telah memasuki masa purna bakti.



Sumber: Data diolah dari Data Kepegawaian BBRBLPP

Gambar I. 5. Jumlah Pegawai Lingkup BBRBLPP Menurut Fungsional dan Non Fungsionalnya

Dari grafik 1.5 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai fungsional di BBRBLPP lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai non-fungsional. Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai fungsional di BBRBLPP dari Tahun 2021 s.d. 2023 mengalami penurunan dan kembali bertambah di tahun 2024 dan 2025, hal ini dikarenakan terdapat penambahan tenaga fungsional yang lulus seleksi PPPK.

Dari kelima grafik diatas, pada tahun 2025 jumlah pegawai BBRBLPP mengalami penurunan jumlah pegawai yang signifikan, dari 395 orang pada tahun 2021 (pegawai manajerial dan penyuluh), pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 346 orang pegawai, dan pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan kembali menjadi 298 orang pegawai dan pada tahun 2024 kembali mengalami penambahan menjadi 337 pegawai dan tahun 2025 bertambah lagi menjadi 461 pegawai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan dinamika pegawai di BBRBLPP diantaranya dengan masuknya tenaga PPPK dan CPNS Penyuluh Perikanan, ada pula beberapa pegawai yang telah purna tugas pada tahun 2025 dan mutasi dari instansi lain. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1. Data pegawai BBRBLPP yang pensiun pada tahun 2025

NO	NAMA, NIP	NIP	JABATAN	TAHUN LAHIR	TAHUN BERJALAN	USIA	TAHUN PENSIUN	STATUS
1	Ir. Made Mariada	19641231 198703 1 320	Penyuluh Perikanan Madya	1964	2025	61	2025	Jan-25
2	Ir. Hj. Fitriah	19641231 199203 2089	Penyuluh Perikanan Madya	1964	2025	61	2025	Jan-25
3	Meludi, S.P	19641225 198801 1 003	Penyuluh Perikanan Madya	1964	2025	61	2025	Jan-25
4	I Wayan Tagel, SP	19641231 198603 1 274	Penyuluh Perikanan Madya	1964	2025	61	2025	Jan-25
5	Sang Putu Dirga, SP. M.Si	196412311988031244	Penyuluh Perikanan Madya	1964	2025	61	2025	Jan-25
6	Lilik Kayanah, S.P	19651001 198802 2 002	Penyuluh Perikanan Madya	1965	2025	60	2025	Nov-25
7	Ir. Rana Tuan	19651124 199403 2 009	Penyuluh Perikanan Madya	1965	2025	60	2025	Dec-25
8	Dolpi J.E. Nubatonis	19661231 198903 1 213	Penyuluh Perikanan Penyelia	1966	2025	59	2025	Jan-25
9	Lalu Sahril, A.Md	19661231 198710 1 007	Penyuluh Perikanan Penyelia	1966	2025	59	2025	Jan-25
10	Hulaini	19661231 199203 1 140	Penyuluh Perikanan Penyelia	1966	2025	59	2025	Jan-25
11	I Nyoman Wijana	19661231 198803 1 192	Penyuluh Perikanan Penyelia	1966	2025	59	2025	Jan-25
12	Alisani	19670216 200604 2 010	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	1967	2025	58	2025	Maret 2025
13	Gusti Putu Karnata, S.Pi	19670519 199403 1 012	Penyuluh Perikanan Muda	1967	2025	58	2025	Juni 2025

Sumber: Data diolah dari Data Kepegawaian BBRBLPP

Berdasarkan tabel kepegawaian di atas, berkurangnya jumlah pegawai yang dialami BBRBLPP pada tahun 2025 disebabkan karena 13 orang pegawai yang berakhir masa tugas.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

BBRBLPP selain melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan ditetapkan sebagai satuan administrasi pangkalan (Satminkal) untuk penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali, NTT, NTB dan Kalimantan Tengah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di keempat provinsi tersebut didukung oleh 400 penyuluh perikanan (222 Penyuluh PNS dan 178 Penyuluh PPPK).

Kegiatan di BBRBLPP didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana berupa:

1. Auditorium, kapasitas 200 orang
2. Ruang Pertemuan, kapasitas 50 orang
3. Laboratorium, 6 Unit:
 - a. Laboratorium Patologi
 - b. Laboratorium Kimia
 - c. Laboratorium Biologi
 - d. Laboratorium Tuna
 - e. Laboratorium Pakan Alami
 - f. Laboratorium Bioteknologi
4. Hachery dan Kolam/ Bak Ikan
5. Karamba Jaring Apung (KJA), Luas ijin KKPR 9,01 Ha
6. Tambak, Luas Lahan 146.000 m²

Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan No 33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset di bidang Perikanan Air Payau”. Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBRBLPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) BBRBLPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) BBRBLPP. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BBRBLPP kedepannya.

Anggaran untuk kegiatan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari Pusat Penyuluhan KP. Penganggaran BBRBLPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran BBRBLPP pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 2. Anggaran BBRBLPP TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	51.886.934.000
2	Belanja Barang	8.645.841.000
3	Belanja Modal	0
Total Anggaran		60.532.775.000

Sumber: Aplikasi Om Span Kementerian Keuangan
(<https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>)

Pada TA 2025 pagu anggaran BBRBLPP adalah sebesar Rp.60.532.775.000,- untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BBRBLPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode TA 2025 diantaranya sebagai berikut:

- Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
- Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
- Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/ pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, *ice flake*, dll.);
- Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar dan petambak garam);
- Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/ IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar dan petambak garam);
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan;

1.5.2. Permasalahan

Pada kegiatan di BBRBLPP terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Nilai PNBPN Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) berpotensi tidak tercapai, selain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran juga disebabkan karena target panen tahap pembesaran tidak dapat terlaksana sampai akhir tahun 2025 karena benih belum mencapai ukuran siap untuk dipanen secara massal.
2. Ketercapaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP terkendala karena:
 - a. Dari 13 orang yang diusulkan untuk ikut Ujikom, terdapat 5 orang tidak bisa mengikuti ujikom disebabkan pendidikannya belum memenuhi syarat yaitu minimal D3;
 - b. Terdapat 1 orang penyuluh telah mengikuti ujikom dan telah lulus tahap I, namun tahap II tidak lulus karena tidak masuk pada perangkan;
 - c. Sisanya sebanyak 6 orang tidak lulus setelah mengikuti ujian dan hanya 1 orang telah lulus.

Pada kegiatan penyuluhan beberapa permasalahan yang ditemukan dari aspek penyelenggaraan maupun ketenaga penyuluhan antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
2. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
3. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
4. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

1.6. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan pada Tahun 2025. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, LKJ ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) pada akhir tahun 2025. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BBRBLPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BBRBLPP.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan uraian singkat tentang rencana strategis BBRBLPP 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja BBRBLPP tahun 2025 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indicator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indicator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi.
6. **Lampiran**
 - a. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja
 - b. Data Dukung Capaian Kinerja
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel II. 1. Rencana Kerja
BBRBLPP TA 2025**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN (Rp. 000)	ANGGARAN (Rp. 000)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	61.146.934.000	61.146.934.000	61.146.934.000	57.246.185.000
2	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.218.184.000	3.367.964.000	3.367.964.000	3.286.590.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025		64.365.118.000	64.514.898.000	64.514.898.000	60.532.775.000
Tanggal Pengesahan		02-Dec-24	21-Apr-25	08-Juli-25	01-Sept-25

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan dengan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Penetapan kinerja BBRBLPP Tahun 2025 atau Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut merupakan salah satu Program Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program dari indikator tersebut didukung oleh 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan dukungan manajemen internal lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP dan kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, BBRBLPP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BBRBLPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan kelautan dan Perikanan.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BBRBLPP pada Tahun 2025 untuk semua SK berjumlah 16 (enam belas) IK. Sebagai alat ukur pencapaian SK, target 16 (enam belas) IK BBRBLPP yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja BBRBLPP TA 2025

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.140
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	359
		4	Gabungan kelompok dan/ atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BBRBLPP (Unit)	49
		5	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0,2413
		6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	1
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP (Dokumen)	1
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85

	11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92
	12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81
	13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5
	14	Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (Indeks)	81
	15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80
	16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80

Sumber : data diolah dari Perjanjian Kinerja (PK) BBRBLPP dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025

Berikut adalah capaian kinerja yang diperoleh Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan tahun 2024:

Tabel III. 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Kegiatan/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)	3.140	3.140	3.768	120,00
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok)	98	98	118	120,00
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (Kelompok)	359	359	432	120,00
		4	Gabungan kelompok dan/ atau koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BBRBLPP (Unit)	49	49	60	120,00

		5	Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar)	0,2413	0,2413	0,2518	104,35
		6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket)	1	1	2	120,00
		7	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang)	1	1	1	100,00
		8	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)	10	10	12	120,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP (Dokumen)	1	1	2	120,00
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%)	85	85	85	100,00
		11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	92	92	99,96	108,65
		12	Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai)	81	81	83,05	102,53
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)	71,5	71,5	100	120,00
		14	Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (Indeks)	81	81	83,39	102,95
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)	80	80	100	120,00
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)	80	80	97,5	120,00

1.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBRBLPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

1.2. Hasil Pengukuran BBRBLPP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan tahun 2025 dapat tercapai. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi yang dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah serta potensi masalah yang akan mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat rutin, rapat koordinasi dengan pelaksana kegiatan, kunjungan langsung ke lapangan dan penanggung jawab serta pelaksana kegiatan, evaluasi kegiatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya. Penjelasan lebih rinci dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

SS 1 : Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Nilai sasaran strategis Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebesar 114,63%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 8 (delapan) IKU sebagai berikut:

IKU 1. : Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok)

IKU ini merupakan indikator Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun sebelumnya oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan

manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Cara perhitungan IKU adalah Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala BBRBLPP. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) kelompok.

Tabel III. 2. Tabel Capaian Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP Tahun 2025

IKU-1. Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (kelompok)									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
5.419	5.281	5.487	5.780	3.140	3.768	120,00	30,86	3.896	96,71

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP (Kelompok) terhadap target tahunannya sebesar 120,00%, dengan capaian 3.768 kelompok dari target tahunan 3.140 kelompok. Jika dibandingkan dengan target triwulan IV maka capaian IKU ini sebesar 120% (dari target 3.140, capaian sebesar 3.768 kelompok). Perbandingan pencapaian IKU ini pada tahun sebelumnya menurun sebesar -30,86%, atau lebih rendah sebesar 1.682 kelompok yang disuluh. Penurunan ini seiring dengan fokus pada pelaksanaan pelaksanaan pembinaan kinerja yang lebih sering dilakukan di tahun ini untuk menindaklanjuti perubahan regulasi kelembagaan kelompok dari KepMen KP Nomor 14 tahun 2012 agar sesuai Permen KP Nomor 28 tahun 2024 dan format profil kelompok KP kepada penyuluh perikanan. Melakukan diskusi di WAG penyuluh perikanan dan koordinator penyuluh perikanan terkait perubahan regulasi, tindak lanjut terhadap perubahan. Melakukan monitoring evaluasi pelaporan data dukung penyuluh perikanan secara rutin oleh Timja Penyuluhan. Melakukan koordinasi dengan Pusluh terkait regulasi kelembagaan kelompok serta pemenuhan data dukung capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 96,71%.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP pada 4 tahun terakhir selalu mengalami perubahan dimana pada tahun 2021 tercapai sebesar 5.419 kelompok, tahun 2022 tercapai sebesar 5.281 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 5.487 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 5.780 kelompok.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BBRBLPP jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (kelompok) oleh BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	4.580	5.500	120,00
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	3.430	3.7.11	108,19
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	4.800	5.665	118,02
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	3.140	3.768	120,00

Sumber : Data yang diolah dari aplikasi Kinerjaku 4 Satminkal

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (kelompok) BBRBLPP dan 3 (tiga) satker lain sudah mencapai di atas 100% bahkan telah melebihi target yang telah ditentukan.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Pelibatan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal.
2. Setiap pengambilan keputusan yang nantinya berdampak kepada mitra komunitas maka hendaknya pendamping mengikut sertakan mitra komunitas.
3. Pendamping meningkatkan hubungan dengan mitra komunitasnya.
4. Pendamping sebaiknya lebih memperdalam keilmuan atau pun keterampilan baik dilakukan secara otodidak atau dengan cara lainnya.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah :

- a. Pendampingan dan Penyusunan profil Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha;
- b. Verifikasi dan validasi Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang disuluh
- c. Pelaksanaan pembinaan kinerja untuk menindaklanjuti perubahan regulasi kelembagaan kelompok dari KepMen KP Nomor 14 tahun 2012 agar sesuai Permen KP Nomor 28 tahun 2024 dan format profil kelompok KP kepada penyuluh perikanan.
- d. Melakukan diskusi di WAG penyuluh perikanan dan koordinator penyuluh perikanan terkait perubahan regulasi, tindak lanjut terhadap perubahan.
- e. Melakukan monitoring evaluasi pelaporan data dukung penyuluh perikanan secara rutin oleh Timja Penyuluhan.
- f. Melakukan koordinasi dengan Pusluh terkait regulasi kelembagaan kelompok serta pemenuhan data dukung capaian kinerja.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan pagu anggaran sebesar 3.286.590.000 dan realisasi sebesar 3.284.153.161 atau 99,93%, jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di tahun 2025 adalah sebesar 20,07%.

IKU 2. : Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP

Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Cara penghitungan IKU ini adalah hitung jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP No. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tabel III. 4. Tabel Capaian Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP Tahun 2025

IKU-2. Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (kelompok)									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
207	250	297	312	98	118	120,00	-62,18	102	115,69

Keterangan:

Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP (Kelompok) terhadap target tahunan sudah tercapai sebesar 120%, dengan jumlah capaian sebesar 118 kelompok dari target di tahun 2025 sebesar 98 kelompok. Jika dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada tahun sebelumnya, capaian IKU ini mengalami penurunan sebesar -62,18% dari tahun lalu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 115,69%. Pelaksanaan pembinaan kinerja lebih

sering dilakukan di tahun ini untuk menindaklanjuti perubahan regulasi kelembagaan kelompok dari KepMenKP Nomor 14 tahun 2012 agar sesuai PerMen KP Nomor 28 Tahun 2024 kepada penyuluh perikanan, terkait mekanisme peningkatan kelas kelompok beserta kelengkapan administrasinya Tim penyuluhan Satminkal BBRBLPP telah melakukan diskusi di WAG penyuluh perikanan dan koordinator penyuluh perikanan terkait perubahan regulasi, tindak lanjut terhadap perubahan. Melakukan monitoring evaluasi pelaporan data dukung penyuluh perikanan secara rutin oleh Timja Penyuluhan. Melakukan koordinasi dengan Pusluh terkait regulasi kelembagaan kelompok serta pemenuhan data dukung capaian kinerja. Peningkatan kelas kelompok lebih selektif lagi dilakukan, sesuai dengan indikator umum dan khusus pada PerMen KP Nomor 28 tahun 2024 dan kelas kelompok beserta data dukungnya.

Perubahan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebanyak 207 kelompok, tahun 2022 tercapai sebesar 250 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 297 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 312 kelompok.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan kelasnya di BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 5. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	168	175	104,17
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	149	160	107,38
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	248	250	100,81
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	98	118	120,00

Sumber : Data yang diolah dari aplikasi Kinerjaku 4 Satminkal

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BBRBLPP jika dibandingkan dengan 4 Satminkal lingkup Pusluh KP, maka BBRBLPP Gondol memperoleh capaian tertinggi yaitu sebesar 120,00%, dan Satminkal lain dengan capaian BRPBAPPP 104,17%, BRPUPP Palembang sebesar 107,38%, dan BRBATPP sebesar 100,81%.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Perikanan yang dilakukan melalui:
 - a. Perbaikan internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring; dan
 - b. Fasilitasi pembiayaan untuk operasional penyuluhan.
2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui program pemberdayaan yaitu:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pengembangan Modal;
 - c. Pengembangan Usaha; dan
 - d. Pengembangan Kelembagaan Usaha.

Proses penilaian kelas kelompok ini dimulai dari SK Kepala Dinas, Proses Penilaian ke Kelompok, Rapat Penilaian, Sampai Sertifikat Kelompok diterbitkan oleh Camat, membutuhkan proses waktu yang lama disebabkan melibatkan banyak pihak. SK Penetapannya belum keluar disebabkan masih adanya verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah. Penggantian PPB di kabupaten kota sehingga Penyuluh Perikanan Bantu masih dalam proses pengenalan kelompok. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, dan koordinasi ini telah terbangun dengan baik sehingga IKU ini telah tercapai sesuai target tahunannya.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah:

1. Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
2. Telah dilakukan Validasi data capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya

Anggaran yang mendukung IKK ini berasal dari kegiatan pendukung (KRO) Kelompok Pelaku Utama/ Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari penyuluh KP yang digabung untuk mendukung 4 IKU Utama Penyuluhan yaitu sebesar 3.286.590.000, dengan realisasi sebesar 99,93%. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK di tahun 2025 yang sudah tercapai sebesar 120%. Maka efisiensi di tahun 2025 ini sebesar 20,07%.

IKU 3: Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Cara perhitungan IKU ini adalah Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria

pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tabel III. 6. Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP Tahun 2025

IKU-3. Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP (kelompok)									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
237	311	368	458	359	432	120,00	-5,68	377	114,59

Keterangan:

Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk di BBRBLPP terhadap target tahunannya sebesar 120,00%. Dimana capaian IKU ini sebesar 432 kelompok dari target 359 kelompok. Perbandingan pencapaian IKU ini pada tahun yang sama di tahun sebelumnya, maka pencapaian di tahun ini mengalami penurunan sebesar -5,68%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 114,59%.

Perubahan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebanyak 237 kelompok, 2022 tercapai sebesar 311 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 368 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 458 kelompok.

Perubahan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebanyak 237 kelompok, tahun 2022 tercapai sebesar 311 kelompok, tahun 2023 tercapai sebesar 368 kelompok, dan tahun 2024 tercapai sebesar 458 kelompok.

Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 7. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/ atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	497	535	107,65
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	442	465	105,20
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	889	911	102,47
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	359	432	120,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP Gondol memiliki capaian maksimal dengan kategori istimewa yaitu dengan capaian 120%. Satminkal lainnya yaitu BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang dan BRPBATPP Bogor memiliki capaian 107,65%, 105,20% dan 102,47%.

Hal yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai target indikator ini adalah dengan meningkatkan kinerja penyuluh dengan sebaik baiknya dan melakukan pemantauan serta pengawalan dalam mengejar capaian setiap triwulan bahkan tahunannya.

Faktor yang mendukung keberhasilan IKU ini adalah :

1. Komunikasi dan sosialisasi intensif dengan masyarakat kelautan dan perikanan yang belum tergabung dalam kelompok tentang kelembagaan kelompok KP.
2. Pendataan sumber daya alam yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
3. Pendataan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Secara budaya, perekonomian dan interaksi sosial masyarakat.
4. Koordinasi dengan tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal dan informal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah:

1. Pembentukan kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan di Satminkal BBRBLPP
2. Telah dilakukan Validasi data capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk
3. Pendampingan kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Anggaran yang mendukung IKK memiliki alokasi anggaran yang tergabung dalam 1 (satu) pagu sebesar Rp. 3.266.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.284.153.161 (99,93%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di tahun 2025 ini sebesar 20,00%.

IKU 4: Gabungan Kelompok/ Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 49 (empat puluh sembilan) unit.

Cara perhitungan IKU ini adalah hitung Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh Kelautan dan Perikanan.

Tabel III. 8. Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP (unit) pada Tahun 2025

IKU-4. Gabungan Kelompok dan/ atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari penyuluh KP di BBRBLPP (unit)									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0	0	49	60	120,00	-	69	86,96

Keterangan:

Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/ atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari penyuluh KP di BBRBLPP jika dibandingkan dengan target tahunannya maka capaiannya sebesar 122,45%, dengan capaian sebanyak 60 unit, dari target 49 unit. namun karena pada aplikasi kinerjaaku yang merupakan aplikasi pengukur kinerja lingkup KKP, nilai toleransi maksimal adalah 120,00% maka persentase capaiannya adalah 120,00%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka indikator ini tidak bisa dibandingkan karena merupakan indikator baru pada tahun 2025 ini. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 86,96%.

Pelaksanaan pembinaan kinerja lebih sering dilakukan di tahun ini untuk menindaklanjuti perubahan regulasi kelembagaan kelompok dari KepMen KP Nomor 14 tahun 2012 agar data dukung yang diajukan sesuai Permen KP Nomor 28 tahun 2024. Diharapkan kepada penyuluh perikanan terkait pendampingan/ pembentukan Gapokkan/Koperasi beserta kelengkapan administrasi pendukung (Profil). Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan KDMP lingkup BBRBLPP. Melakukan diskusi di WAG penyuluh perikanan dan koordinator penyuluh perikanan terkait perubahan regulasi, tindak lanjut

terhadap perubahan. Melakukan monitoring evaluasi pelaporan data dukung penyuluh perikanan secara rutin oleh Timja Penyuluhan. Melakukan koordinasi dengan Pusluh terkait regulasi kelembagaan kelompok serta pemenuhan data dukung capaian kinerja.

Perubahan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/ atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan dari penyuluh KP di BBRBLPP selama 4 tahun terakhir belum bisa dibandingkan, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 belum ada capaian, dikarenakan IKU ini baru ada pada tahun 2025.

Faktor keberhasilan dari pencapaian IKU ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyuluhan Perikanan yang dilakukan melalui:
 - a. Perbaikan internal organisasi yang menyangkut Pemberian motivasi terhadap penyuluh baik menyangkut karier, penghargaan, termasuk melakukan supervisi dan monitoring; dan
 - b. Fasilitasi pembiayaan untuk operasional penyuluhan.
2. Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui progam pemberdayaan yaitu:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Pengembangan Modal;
 - c. Pengembangan Usaha; dan
 - d. Pengembangan Kelembagaan Usaha.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini adalah :

1. Pendampingan dan Penyusunan profil Gabungan Kelompok/ Koperasi sektor kelautan dan perikanan di satminkal BBRBLPP;
2. Telah dilakukan verifikasi dan validasi IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi sektor kelautan dan perikanan
3. Telah dilakukannya kegiatan penyuluhan oleh penyuluh perikanan Satminkal BBRBLPP seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan.

Capaian IKU Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi/ yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 9. Perbandingan Capaian IKU Gabungan Kelompok dan/ atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	43	52	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	28	36	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	43	52	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	49	60	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP dan 3 satminkal lainnya yaitu yaitu BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor dan BRPPUPP Palembang telah mencapai target bahkan melebihi dengan capaian sebesar 120% atau dengan kategori istimewa.

Anggaran yang mendukung IKK memiliki alokasi anggaran yang tergabung dalam 1 (satu) pagu sebesar Rp. 3.266.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.284.153.161 (99,93%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%. Maka efisiensi di tahun 2025 ini sebesar 20,00%.

IKU 5.: Nilai PNBP Satker BBRBLPP

Indikator Kinerja ini merupakan :

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
- Dasar hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
 - b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 0,2413 (nol koma dua empat satu tiga rupiah milyar). Cara perhitungan IKU ini adalah dengan menjumlahkan Nilai PNBP SDA dengan Nilai PNBP Lainnya.

Nilai PNBP Sektor KP = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP lainnya

Tabel III. 10. Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP Tahun 2025

IKU-5. Nilai PNBP Satker BBRBLPP (rupiah milyar)									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0,793	1107,87	0,2413	0,2518	104,35	-99,98	0,556	45,29

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) terhadap target tahunan sudah tercapai sebesar 104,35% Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 0,2413 rupiah milyar dan sudah tercapai sebesar 0,2518 rupiah milyar. Jika dibandingkan dengan capaian IKU yang sama pada tahun sebelumnya, maka capaian IKU ini terdapat penurunan sebesar -99,98%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi/ blokir anggaran sehingga kegiatan smart fisheries village (SFV) yang menyumbangkan PNBP terbanyak tidak bisa berjalan optimal. Dan Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 45,29%.

Perubahan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 dan 2022 belum ada capaian PNBP karena belum ada target PNBP pada Perjanjian Kinerja (PK), tahun 2023 tercapai sebesar 0,0793 (rupiah milyar), dan tahun 2024 tercapai sebesar 1.107,87 (rupiah juta).

Capaian IKU Nilai PNBP satker BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 11. Perbandingan Capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP dengan Satminkal Lain Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0,94	1,03	109,57
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0,04	0,04	103,54
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0,09	0,18	120,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0,24	0,25	104,17

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Nilai PNBP satker BBRBLPP telah tercapai 104,17%, BRPBAPP tercapai sebesar 109,57%, BRPPUPP tercapai 103,54% dan yang tertinggi adalah BRPBATPP sebesar 120,00%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah :

1. Telah Tersusunnya laporan penerimaan PNBP dan
2. Terkelolanya dengan baik pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya yang dikelola dan dilaporkan.

Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan untuk capaian IKU Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Juta) ini berasal dari sewa aset dan sebagian besar berasal dari kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) dimana kegiatan SFV ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan di 3 lokasi yaitu: 1. Lokasi Kantor Utama di Desa Penyabangan, 2. Lokasi Instalasi Karamba Jaring Apung (KJA) di Desa Sumberkima, dan 3. Lokasi Instalasi Tambak di Desa Pejarakan dan juga dari sewa aset. Disamping itu kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah penyusunan laporan penerimaan PNBP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Program Dukungan Management dengan anggaran sebesar Rp3.850.000 dan telah terealisasi sebesar Rp3.850.000 (100%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 104,35%. Maka efisiensi tahun 2025 ini sebesar 4,35%.

IKU 6.: Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha Di Satker BBRBLPP (Paket)

IKU ini merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh BBRBLPP yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ditetapkan dengan target 1 (satu) paket.

Cara perhitungan IKU ini adalah hitung jumlah materi dan/atau Metode Penyuluhan yang Ditetapkan.

Tabel III. 12. Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP pada Tahun 2025

IKU-6. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0	0	1	2	120,00	-	2	100,00

Keterangan:

Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaku

Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP tahun 2025 telah tercapai 120,00% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka IKU ini tidak bisa dibandingkan karena target indikator ini baru ada di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 100,00%.

Hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah mempertahankan kinerja yang baik bagi penyuluh dalam penyusunan media penyuluhan yang bisa diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat serta merealisasikan output capaian tahunannya.

Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 13. Perbandingan Capaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP (paket) Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP, capaian Satker BRPBAPPP Maros, BRPPUPP

Palembang dan BBRBLPP Gondol telah tercapai sebesar 120%, sedangkan BRPBATPP tercapai sebesar 100%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKU Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BBRBLPP ini adalah Pembuatan media penyuluhan yang sesuai dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan sasaran, pemilihan media yang tepat, penyampaian pesan yang relevan, partisipasi aktif pelaku usaha, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapan IKU ini meliputi Pembuatan media penyuluhan, identifikasi kebutuhan pelaku usaha, pengembangan materi penyuluhan yang relevan, pemilihan media yang tepat, dan evaluasi dampak kegiatan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Fasilitasi Kelompok dengan tidak mendapatkan porsi anggaran dan hingga akhir tahun 2025 ini tidak terdapat realisasi. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini pada tahun 2025 telah terdapat capaian sebesar 120% maka efisiensi nya tidak bisa dihitung.

IKU 7.: Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang)

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) ditetapkan dengan target 1 (satu) orang.

Cara perhitungan indikator ini adalah Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh Assesment Center KKP.

Tabel III. 14. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) Tahun 2025

IKU-7. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0	0	1	1	100,00	-	2	100,00

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP (Orang) terhadap target tahunan sudah tercapai sebanyak 1 orang dari target 2025 sebanyak 1 orang, jika dibandingkan dengan capaian 1 hingga 4 tahun sebelumnya

indikator ini tidak bisa dibandingkan karena pada 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya belum ada target untuk indikator ini. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentasenya adalah 100% atau capaian sebesar 1 orang.

Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup Pusluh KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 15. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang) Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	5	11	120,00
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	2	3	120,00
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	3	5	120,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi di BBRBLPP (Orang), BBRBLPP tercapai 100,00% sedangkan 3 (tiga) satminkal lain telah tercapai 120%.

Kegiatan pendukung pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) jumlah penyuluh perikanan yang lulus Uji Kompetensi meliputi:

1. Penyusunan usulan Penyuluh Perikanan yang mengikuti penilaian kompetensi dan
2. Pemantauan hasil penilaian kompetensi Penyuluh Perikanan.

Faktor-faktor pendukung lainnya adalah:

1. Dukungan Pemerintah:

Kebijakan dan regulasi yang mendukung uji kompetensi, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan dan uji kompetensi, serta insentif bagi penyuluh yang lulus, sangat penting.

2. Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh:

Pelatihan yang berkualitas, pengembangan kompetensi, dan akses terhadap informasi dan teknologi terbaru akan meningkatkan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pemanfaatan Teknologi:

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyuluhan, seperti aplikasi mobile, platform daring, dan media sosial, akan mempermudah penyampaian informasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

4. Kolaborasi Antar Pihak Terkait:

Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku usaha perikanan akan memperkuat upaya peningkatan kompetensi penyuluh.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, peningkatan kualitas SDM penyuluh, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi yang efektif, maka IKU jumlah penyuluh perikanan yang lulus Uji Kompetensi dapat tercapai dengan baik.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU ini adalah telah diusulkannya 11 orang tenaga penyuluh perikanan yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi, pengusulan ini diajukan ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO penyuluhan perikanan yang bersertifikat kompetensi dengan tidak mendapat alokasi anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 belum ada capaian IKU. Maka nilai efisiensi di tahun 2025 ini juga tidak bisa dihitung.

IKU 8.: Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang)

IKU ini merupakan :

- 1) Indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku;
- 2) Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan dengan target 10 (sepuluh) orang. Cara perhitungan IKU ini adalah dengan membandingkan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan yang lulus pelatihan teknis dengan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025, atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

Tabel III. 16. Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) Tahun 2025

IKU-8. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	0	0	10	12	120,00	-	18	66,67

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU jumlah penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) jika dibandingkan dengan target tahunan sudah tercapai sebanyak 12 orang dari target 2025 sebanyak 10 orang atau 120,00%, jika dibandingkan dengan capaian 1 hingga 4 tahun sebelumnya indikator ini tidak bisa dibandingkan karena pada 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya belum ada target untuk indikator ini. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 66,67% dengan target 18 orang.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah pengetahuan penyuluh yang mumpuni, keterampilan praktis, kemampuan berkomunikasi yang baik, semangat kerja yang tinggi, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari pemerintah/ lembaga terkait.

Capaian IKU jumlah penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 17. Perbandingan Capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	14	17	120,00
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	19	23	120,00
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	14	18	120,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BBRBLPP (Orang) dan 3 (tiga) Satminkal lain sudah tercapai melebihi target dengan predikat Istimewa 120,00%.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini adalah pengetahuan penyuluh yang kuat, keterampilan praktis, kemampuan berkomunikasi yang baik, semangat kerja yang tinggi, dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari pemerintah/ lembaga terkait.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini adalah :

1. Pemantauan hasil sertifikasi kompetensi Penyuluh Perikanan
2. Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang baru lulus pelatihan akan fokus pada kegiatan lapangan, seperti memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat nelayan, kelompok perikanan, dan pelaku usaha perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO penyuluhan perikanan yang bersertifikat kompetensi dengan tidak terdapat porsi anggaran dan tidak terdapat realisasi anggaran dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 sebesar 120,00%, maka nilai efisiensi belum bisa dihitung.

SS2. : Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKU.9 :Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen)

IKU ini merupakan jumlah dokumen kerja sama BBRBLPP antar lembaga yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Cara perhitungan capaian IKU ini adalah hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerjasama lingkup antar lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bersama para pihak kerja sama.

Pada tahun 2025 ini BBRBLPP memiliki target kemitraan yang disepakati sebanyak 1 (satu) dokumen. Cara penghitungan IKU ini adalah jumlah Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen kerjasama lingkup antar lembaga dan disepakati BBRBLPP bersama para pihak kerja sama. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati BBRBLPP tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 18. Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP (Dokumen) Tahun 2025

IKU-9. Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
3	2	3	4	1	2	120,00	-50,00	3	66,67

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP (Dokumen) jika dibandingkan dengan target tahunan sudah tercapai sebanyak 2 dokumen dari target 2025 sebanyak 1 dokumen. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah di tahun 2029 maka sudah tercapai sebesar 66,67% dari target 3 dokumen. Perubahan Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 sebanyak 3 dokumen, tahun 2022 sebanyak 2 dokumen, tahun 2023 tercapai sebanyak 3 dokumen dan tahun 2024 tercapai sebanyak 4 dokumen.

Progres indikator ini sudah berjalan 2 kerjasama terkait dengan pemanfaatan asset, dengan judul:

1. Perjanjian Sewa Menyewa antara BBRBLPP dengan Koperasi Pegawai “Balidita” dengan objek sewa berupa sebagian tanah dan/ atau gedung bangunan pada BBRBLPP dengan luas 5x8 M2 terletak di Banjar ;
2. Dinas Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak merupakan bagian dari sertifikat Hak Pakai Nomor 3, dengan batas yang telah disepakati;
3. Perjanjian Sewa Menyewa antara BBRBLPP dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Kantor Cabang Singaraja.

Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) jika dibandingkan dengan satker lingkup Pusluh KP yang memiliki indikator yang sama maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 19. Capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di BBRBLPP pada tahun 2025

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian IKU Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti dari 4 (empat) Satminkal yang dibandingkan, keseluruhan telah tercapai 120%. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya hubungan yang baik antara BBRBLPP dengan pihak yang melakukan kerjasama sehingga kerjasama yang dilakukan dapat terlaksana, selain itu perlu pendampingan dari pusat terutama untuk tata kelola kerjasama yang baik. Hal lain yang mendukung IKU ini adalah adanya dukungan administrasi yang baik dari pusat terkait dengan penandatanganan dokumen Kerjasama jika diperlukan, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang IKU ini adalah :

1. Penyusunan laporan kegiatan kemitraan dan/atau kerja sama;
2. Segera menindaklanjuti dokumen–dokumen perjanjian kerjasama dan melakukan pemantauan dan pengawalan kegiatan kerjasama dalam merealisasikan output capaian tahunannya.
3. Selain itu perlu juga di inisiasi kerjasama-kerjasama yang dinilai strategis yang dapat mendukung visi BBRBLPP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan anggaran sebesar Rp5.950.000,- dan hingga tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp5.950.000,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di akhir tahun sebesar 120%, maka nilai efisiensi tahun 2025 ini sebesar 20%.

IKU 10.: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP

IKU ini merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BBRBLPP sampai dengan waktu pengukuran.

Cara perhitungan capaian IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit eselon II, dengan rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindakInjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II}} \times 100$$

Berikut Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP tahun 2025:

Tabel III. 20. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP Tahun 2025

IKU-9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	100	100	85	85	100,00	-15,00	85	100,00

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP (%) jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 maka capaian IKU ini adalah 100%, dari target tahunan sebesar 85, tercapai sebesar 85 atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka capaian di tahun ini mengalami penurunan sebesar -15,00, karena capaian tahun ini menurun dari 100 pada tahun lalu menjadi 85 pada tahun ini. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada 4 tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat capaian karena IKU Persentase Rekomendasi ini baru ada di tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%, dan tahun 2024 sebesar 100%.

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam penilaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusat Penyuluhan KP. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP satker lingkup Pusluh KP pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 21. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satminkal lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	100	117,65
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100,00

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan BBRBLPP yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRBLPP dengan tiga satker yang dibandingkan yaitu BRPBAPPP Maros, BRPBATPP Bogor dan BRPPUPP Palembang memiliki capaian yang sama yaitu 117,65%, sedangkan BBRBLPP Gondol memiliki capaian 100%.

Hal yang telah dilakukan oleh ketiga satker yg memiliki capaian di atas 100% adalah menindaklanjuti secara tuntas rekomendasi hasil pengawasan Itjen oleh unit eselon III.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IKU ini adalah respon cepat BBRBLPP dalam hal rekomendasi hasil pengawasan Itjen. Hal tersebut didukung oleh tim yang handal dan SDM yang bekerja dengan baik sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tindak lanjut dengan lebih efisien dan cepat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini menindaklanjuti dengan cepat rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dari Aplikasi SIDAK
2. Mmenindaklanjuti dengan cepat rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Operasional, Layanan Umum, dan Layanan Manajemen Internal dengan anggaran sebesar Rp4.518.295.738 dan hingga akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp4.517.431.263,- (99,98%), jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 sebesar 100%, maka nilai efisiensi sebesar 0,02%.

IKU 11.: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)

IKU ini merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- (1) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- (2) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
- (3) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- (4) Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Cara penghitungan IKU ini mengacu pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP yang terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; (b) Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; (c) Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA > 70 . Pada tahun 2023 ini BBRBLPP memiliki target Nilai IKPA BBRBLPP sebesar 89 (delapan puluh sembilan) nilai. Cara perhitungan capaian IKU ini dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Tabel III. 22. Uraian Indikator IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBRBLPP tersaji pada tabel berikut.

Tabel III. 23. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP tahun 2025

IKU-9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
98,54	99,69	96,05	99,50	92	99,96	108,65	11,35	92	108,65

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) di tahun 2025 sudah tercapai sebesar 108,65% dengan capaian nilai 99,96. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya maka capaian tahun ini meningkat sebesar 11,35. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 108,65% dari target 92. Jika dibandingkan dengan capaian pada 4 tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 tercapai sebesar 98,54, tahun 2022 tercapai sebesar 99,69, tahun 2023 tercapai sebesar 96,05 dan tahun 2024 tercapai sebesar 99,50.

Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Pusluh KP, capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP lingkup Pusluh KP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 24. Capaian IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	92	98,46	107,02
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	92	99,72	108,39
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	92	98,09	106,62
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	92	99,96	108,65

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk setiap satker sudah melebihi target dengan capaian BRPBAPPP Maros 107,02%, BRPPUPP Palembang 108,39%, BRPBATPP 106,62% dan BBRBLPP Gondol sebesar 108,65%.

Faktor pendukung tercapainya IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP adalah :

1. Revisi anggaran, pengelolaan UP/TUP dan penyelesaian tagihan, penyusunan Laporan Keuangan, dan penyelenggaraan PIPK;

- Koordinasi yang baik antara Kepala BBRBLPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Perencana Keuangan, Tim Pengelola Keuangan termasuk operator dan stakeholder dalam hal ini adalah KPPN Pratama.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp58.691.356.000,- dan hingga akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp57.451.374.635,- (92%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK sebesar 108,65%, maka nilai efisiensi tahun 2025 sebesar 16,65.

IKU 12.: Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Cara perhitungan Nilai PM SAKIP BBRBLPP adalah Penilaian Mandiri SAKIP Sater adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon II yaitu:

Tabel III. 25. Kategori Nilai PM SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Capaian IKU Nilai PM SAKIP BBRBLPP tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 26. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP Tahun 2025

IKU-9. Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
0	0	82,25	83,5	81	83,05	102,53	-0,54	81	102,53

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP (Nilai) di tahun 2025 sudah tercapai sebesar 83,05 dari target 81, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,54 dengan capaian pada tahun lalu sebesar 83,50. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 102, 53 dari target 81. Penilaian mandiri SAKIP

lingkup BPPSDM dilaksanakan pada tanggal 2-5 Juni 2025 dan sudah dilakukan verifikasi dan validasi.

Perubahan Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 dan 2022 belum ada target indikator Penilaian Mandiri SAKIP pada Perjanjian Kinerja (PK), tahun 2023 tercapai sebesar 82,25 (nilai), dan tahun 2024 tercapai sebesar 83,50 (nilai).

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar pencapaian target tahunannya adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya yang sejenis dan memiliki tusi yang sama, dalam hal ini dibandingkan dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan dan Penyuluhan Perikanan. Berikut adalah perbandingan capaian IKU dimaksud:

Tabel III. 27. Capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP pada Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	83,5	103,09
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	84,4	105,5
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	82,9	102,35
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83,05	102,53

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP dari 4 (empat) satker yang dibandingkan semuanya telah memenuhi target dan tercapai diatas 100%. Pemantauan IKU Nilai PM SAKIP BBRBLPP berdasarkan 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Namun demikian, peran seluruh pegawai lingkup BBRBLPP menjadi salah satu faktor keberhasilan pencapaian target mengingat beberapa persyaratan dokumen PM SAKIP ini merupakan data dukung yang setiap tiga bulan dilaporkan dan di upload oleh seluruh pegawai pada e-kinerja BKN.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja
2. Verifikasi dan validasi data kinerja
3. Evaluasi rencana aksi
4. Penyusunan laporan kinerja
5. Penyiapan dokumen SAKIP
6. Penilaian mandiri SAKIP

Anggaran yang mendukung IKK ini tidak terdapat porsi anggaran hal ini sebagai akibat dari kebijakan efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 telah tercapai sebesar 102,53%, maka nilai efisiensi tahun 2025 tidak bisa dihitung.

IKU 13.: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai)

IKU ini merupakan Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula perhitungan NKPA BBRBLPP menggunakan formula sebagai berikut :

A. Efektivitas

4. Capaian RO

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

B. Efisiensi

1. Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum RO SBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2. Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks SBK_i - Indeks RA SBK_i}{Indeks SBK_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK⁷⁹: Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{Alokasi}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja

Satker CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

Cara penghitungan IKU ini mengacu pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRBLPP yang terhitung/terlaporkan pada Aplikasi OM-SPAN.

Tabel III. 28. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) Tahun 2025

IKU-13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	91,66	71,5	100	120,00	0	73,0	120,00

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) di tahun 2025 tercapai sebesar 100 dari target 71,5 atau 139,85, namun karena pada aplikasi kinerjaaku yang merupakan aplikasi pengukur kinerja lingkup KKP, nilai toleransi maksimal adalah 120,00% maka persentase capaiannya adalah 120,00%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka indikator ini tidak terdapat kenaikan atau penurunan capaian hal ini disebabkan capaian tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sama yaitu 120%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 120%.

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP (Nilai) ini diterapkan diseluruh unit eselon II dan satker lingkup BPPSDM, dimana capaian kinerja BBRBLPP dalam Penilaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 dapat dibandingkan dengan satker lainnya yang sejenis dan memiliki tusi yang sama, dalam hal ini dibandingkan dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan dan Penyuluhan Perikanan. Berikut adalah perbandingan capaian IKU dimaksud:

Tabel III. 29. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	71,5	100	120

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BBRBLPP belum mencapai target yang ditetapkan, begitu pula 3 (tiga) satker lain sudah tercapai sebesar 120,00%. Faktor pendukung tercapainya IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRBLPP ini adalah efektifnya koordinasi antar pihak terkait yaitu kepala satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim perencana, pengelola keuangan serta operator tentang terhadap KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran dan juga PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja kementerian Negara/ Lembaga. Disamping itu faktor pendukung lain adalah Penyusunan laporan dari Aplikasi Monev Kemenkeu.

Anggaran yang mendukung IKK ini tidak terdapat pada anggaran BBRBLPP tahun 2025 dikarenakan dampak dari efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 120%. Maka nilai efisiensi tahun 2025 ini belum bisa dihitung.

IKU 14.: Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP

Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Cara perhitungan Indikator ini adalah:

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
(a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

Tabel III. 30. Indikator Riwayat Pendidikan Formal Terakhir yang Telah Dicapai

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut :

Tabel III. 31. Riwayat Pengembangan Kompetensi

Komponen	Jabatan		
	Struktural	Fungsional	Pelaksana
Diklat Kepemimpinan			
Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	15		
Tidak Pernah Ikut Diklat Kepemimpinan pada levelnya	0		
Diklat Fungsional			
Pernah Ikut Diklat Fungsional		15	
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional		0	
Diklat Teknis 20 JP			
Terpenuhi 20 JP	15	15	22,5
Tidak Terpenuhi 20 JP	dihitung proporsional	dihitung proporsional	dihitung proporsional
Seminar			
Pernah ikut seminar	10	10	17,5
tidak pernah ikut seminar	0	0	0
Total nilai kompetensi	maksimal 40	maksimal 40	maksimal 40
$\text{penghitungan diklat teknis 20 JP} = \frac{n}{20 \text{ JP}} \times 15$			
n= jumlah JP diklat yang diikuti			

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Tabel III. 32. Indikator Penilaian Prestasi Kerja PNS

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Tabel III. 33. Indikator Riwayat Penjatuhan Hukuman Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a) Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b) Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan (1) Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; (2) Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; (3) Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; (4) Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - c) Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d) Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pekerjaan dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas (a) Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); (b) Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); (c) Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan (d) Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ Lev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ Lev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev } 1 + \text{Rerata Nilai IPL\text{ Lev } 2}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Tabel III. 34. Kategori Penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Tabel III. 35. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP Tahun 2025

IKU-13. Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
76,79	79,25	88,14	86,52	81	83,39	102,95	-2,56	84	99,27

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBRBLPP (Indeks) tahun 2025 sudah tercapai sebesar 83,39 dari target 81 atau sama dengan 102,95%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya maka terdapat penurunan capaian sebesar -2,56% dimana pada tahun sebelumnya capaian IKU ini sebesar 86,52. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 99,27%.

Perubahan Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BBRBLPP selama 4 tahun terakhir adalah, pada tahun 2021 tercapai sebesar 76,79 (indeks), tahun 2022 tercapai sebesar 79,25 (indeks), tahun 2023 tercapai sebesar 88,14 (indeks), dan tahun 2024 tercapai sebesar 86,62 (indeks).

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengejar pencapaian target tahunannya adalah mempertahankan kinerja ASN yang baik dan meningkatkan kinerja ASN yang masih kurang dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimtek, diklat 20JP maupun kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja ASN di lingkup BBRBLPP.

Jika dibandingkan dengan capaian satker lain lingkup Pusluh KP, capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 36. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusluh KP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	81	84,29	104,06
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	81	83,35	102,9
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	81	84,99	104,93
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	81	83,39	102,95

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator IP ASN untuk satker BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor dan BBRBLPP Gondol sudah tercapai di atas 100%, atau status **“Baik”**.

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah:

1. Pemantauan data Indeks Profesionalitas ASN
2. Penyusunan laporan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai

Faktor-faktor yang mendukung IKU ini adalah Pemantauan kinerja ASN berdasarkan 4 (empat) sumber data IKU yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu faktor yang mendukung pencapaian target IKU. Namun demikian, distribusi ASN, khususnya penyuluh perikanan menjadi salah satu katalisator keberhasilan pencapaian target mengingat beberapa pelaporan seperti SKP online membutuhkan koneksi internet selain itu, pengiriman dokumen penunjang seperti presensi harus menunggu pengesahan dari dinas sebelum dikirimkan ke BBRBLPP. Sedangkan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah kinerja ASN lingkup BBRBLPP baik pada jabatan struktural, manajerial maupun fungsional.

Anggaran yang mendukung IKK ini tidak terdapat pada anggaran BBRBLPP tahun 2025 dikarenakan dampak dari efisiensi anggaran,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 belum ada realisasi. Maka nilai efisiensi tahun 2025 tidak bisa dihitung.

IKU 15.: Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan

pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel III. 37. Capaian IKU Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) Tahun 2025

IKU-15. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	-	80	100	120	-	82	120,00

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) jika dibandingkan dengan target tahunan, maka tercapai sebesar 125%, namun batas maksimal nilai pada aplikasi kinerjaaku yang merupakan dasar perhitungan kinerja adalah 120%, maka capaiannya adalah 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka tidak dapat dibandingkan karena IKU ini baru ada di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar sebesar 120%.

Perubahan Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 s.d. 2024 tidak dapat dirinci karena pada tahun tersebut belum ada target di Perjanjian Kinerja (PK).

Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) ini dapat dibandingkan dengan satker lainnya lingkup Pusluh KP.

Tabel III. 38. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BBRBLPP (%) Lingkup Pusluh KP Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 4 (empat) satker yang dibandingkan, capaian IKU Presentase rencana umum pengadaan yang diumumkan pada SIRUP seluruhnya telah mencapai 120%, sebagaimana yang tercantum pada surat dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 tertanggal 13 Januari 2025.

Faktor-faktor pendukung IKU ini meliputi :

1. Penginputan data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
2. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
3. Penginputan data realisasi pengadaan barang dan jasa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ini meliputi :

1. Perencanaan Pengadaan:

- Identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- Penetapan jenis barang/jasa.
- Penetapan cara pengadaan.
- Pemaketan.
- Konsolidasi.
- Waktu pemanfaatan barang/jasa.
- Anggaran pengadaan.

2. Penyiapan Rencana Umum Pengadaan (RUP):

- RUP merupakan output dari perencanaan pengadaan.
- RUP dituangkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

3. Pengumuman RUP melalui SIRUP:

- PA (Pengguna Anggaran) atau KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan pengumuman RUP melalui SIRUP.

- Pengumuman ini dapat diakses oleh masyarakat luas.
- SiRUP mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp190.366.000,- dan hingga akhir tahun 2025 sudah terealisasi sebesar Rp190.365.550,- (100%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini tahun 2025 telah tercapai sebesar 120%. Maka nilai efisiensi tahun 2025 ini sebesar 20,00%.

IKU 16.: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%)

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara perhitungan Iku ini adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) tersaji pada tabel berikut:

Tabel III. 39. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) Tahun 2025

IKU-15. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRBLPP									
Realisasi				Tahun 2025				Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 - 2029	
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	-	80	97,5	120,00	-	80	120,00

Keterangan: Sumber : data yang diolah dari aplikasi Kinerjaaku

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) jika dibandingkan dengan target tahunan, maka tercapai sebesar 121%, namun batas maksimal nilai pada aplikasi kinerjaaku yang merupakan dasar perhitungan kinerja adalah 120%, maka capaiannya

adalah 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka tidak dapat dibandingkan karena IKU ini baru ada di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025–2029 persentase capaiannya adalah sebesar 120%.

Perubahan Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 s.d. 2024 tidak dapat dirinci karena pada tahun tersebut belum ada target indikator ini di Perjanjian Kinerja (PK).

Capaian Nilai Kinerja Anggaran satker lingkup Pusluk KP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 40. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) Tahun 2025 dengan Satminkal Lain

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satker		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	90	112,5
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120,00
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5	120,00
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	97,5	120,00

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRBLPP (%) untuk 3 (tiga) satker yaitu BRPPUPP Palembang, BRPBATPP Bogor dan BBRBLPP Gondol sudah tercapai sebesar 120,00%, sedangkan BRPBAPPP tercapai sebesar 112,5%.

Faktor pendukung utama yang berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) antara lain:

1. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset Balai
2. Penyusunan Usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN
3. Penyusunan Laporan BMN
4. Penyusunan RK BMN tahun 2027

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah KRO Layanan Pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp872.829.000,- dan hingga akhir tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp871.989.262,-. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini di tahun 2025 sebesar 120,00%, maka nilai efisiensi tahun 2025 sebesar 20,10%.

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

3.4.1 Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2025

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan mendapatkan penghargaan dari beberapa pihak yaitu:..

Tabel III. 41. Daftar Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal
1	Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2 Desember 2025
2	Peringkat III Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja Dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar Semester I Tahun 2025	KPPN Singaraja	06 Agustus 2025
3	Piagam Penghargaan atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Sekretariat Jenderal KKP	30 Juni 2025
4	Peringkat IV Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat Best Performance Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar	KPPN Singaraja	24 Februari 2025



Piagam Penghargaan atas Peran Sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan



Piagam Penghargaan sebagai Unit Organisasi Berpredikat **Informatif** dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025



Piagam Penghargaan Peringkat III Sater Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat *Best Performance* Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar Semester I Tahun 2025



Piagam Penghargaan Peringkat IV Sater Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat *Best Performance* Kategori Pagu DIPA Kelolaan Besar Semester I Tahun 2025

Gambar III. 1. Penghargaan yang diterima BBRBLPP Tahun 2025

3.4.2. Akuntabilitas Keuangan

Capaian Realisasi Anggaran

Kegiatan manajerial dan penyuluhan di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol tahun 2025 memperoleh dana dari sumber anggaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada awal tahun 2025 BBRBLPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp64.365.118.000. Hingga akhir triwulan II tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama pada 21 Februari 2025 yaitu terkait blokir perjalanan dinas luar kota dan dalam kota sejumlah Rp. 63.197.000,-, dimana total pagu tetap yaitu sebesar Rp64.365.118.000. Revisi kedua pada 20 Maret 2025 terkait Perubahan digital stamp dan Blokir belanja bahan sejumlah Rp. 7.244.883.000,-, dengan total pagu masih sama yaitu sebesar Rp64.365.118.000. Revisi ketiga tanggal 9 April 2025 terkait Pergeseran/Penambahan/ Relaksasi blokir belanja bahan menjadi belanja honor pegawai PJLP, Outsourcing dan PPB berdasarkan arahan sekretariat badan, dengan total pagu terdapat penambahan sebesar Rp149.780.000, sehingga total pagu bertambah menjadi Rp64.514.898.000. Revisi keempat tanggal 21 April 2025 terkait Pemutakhiran halaman III DIPA dan pergeseran POK, dengan jumlah pagu masi sama yaitu sebesar Rp 64.514.898.000,-. Revisi kelima tanggal 08 Juli 2025 terkait Pemutakhiran halaman III DIPA dan pergeseran POK belanja gaji pegawai, plasma nutfah, kebutuhan sehari hari perkantoran dan pemeliharaan gedung/bangunan, dengan jumlah pagu masi sama yaitu sebesar Rp64.514.898.000,-, Revisi keenam tanggal 01 September 2025 terkait Penghapusan pagu blokir dan penyesuaian Hal III DIPA, dengan pengurangan jumlah pagu sebesar Rp3.982.123.000, dari pagu awal sebesar Rp64.514.898.000 menjadi Rp60.532.775.000. Revisi ketujuh tanggal 10 Oktober 2025 dengan tidak ada perubahan pagu sebesar Rp60.532.775.000 terkait Pemutakhiran hasil revisi POK dan halaman III DIPA.

Tabel III. 42. Tabel realisasi anggaran TA 2025 per Sasaran Kegiatan

Sasaran Strategis		Pagu	Realisasi	%
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.290.440.000	3.288.003.161	99,93
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	64.278.796.738	63.037.110.710	98,07
Jumlah		67.569.236.738	66.327.543.191	98,16

Perkembangan Realisasi Anggaran BBRBLPP Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi anggaran Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan tersaji pada Tabel III.56. Dari tabel terebut dijelaskan bahwa realisasi anggaran hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp66.316.633.893 atau 98,16% dari pagu sebesar Rp67.568.397.000, dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp57.440.465.337 atau 97,87%, realisasi belanja barang sebesar Rp8.876.168.556 atau 99,99%, tidak terdapat



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

realisasi belanja modal karena memang tidak ada pagu yang dianggarkan, rincian realisasi anggaran tersebut tersaji pada tabel berikut :

Perkembangan realisasi keuangan pada akhir Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 43. Perkembangan Realisasi keuangan Satker BBRBLPP Gondol per Desember 2025

	RM (Rp)			PNBP (Rp)	
	B.PEGAWAI	B.BARANG	B.MODAL	B.BARANG	B.MODAL
PAGU	58,691,356,000	8,877,041,000	-	-	-
REALISASI	57,440,465,337	8,876,168,556	-	-	-
%	97,87	99,99		-	-
TOTAL PAGU	67.568.397.000			-	
TOTAL REALISASI	66.316.633.893 (98,16%)			-	

Dari data tolak ukur DIPA per akun kegiatan, terlihat anggaran penyerapan anggaran hingga bulan Desember sudah optimal dengan realisasi sebesar 98,16%. Persentase realisasi anggaran per akun kegiatan berdasarkan SAKTI per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 44. Realisasi anggaran per akun kegiatan berdasarkan SAKTI per 31 Desember 2025

	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.286.590.000	3.286.582.481	100
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	64.280.257.000	63.039.410.710	98,07
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	-	-	-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.550.000	1.550.000	100
Jumlah Total Anggaran :		67.568.397.000	66.316.633.893	98,16

3.4.3. Efisiensi Sumber Daya BBRBLPP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBRBLPP ditunjang oleh sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga fungsional perencana, APK APBN, penyuluh perikanan maupun tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi. Sumber daya fisik berupa aset BBRBLPP yang meliputi tanah, bangunan kantor, guest house, prosesing, hatchery, kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan, dan perpustakaan. Sumber daya keuangan/pendanaan dalam pengelolaan kegiatan penyuluhan perikanan, dan pemanfaatan aset untuk program pengembangan perikanan budidaya laut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pendanaan kegiatan pengembangan budidaya perikanan laut tahun 2025 berasal

dari kegiatan kerjasama balai dan pengelolaan hasil penjualan dari kegiatan Smart Fisheries Village (SFV).

Bertitik tolak dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang klasifikasi potensi sumberdaya perikanan secara umum dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (renewable resources) dan tidak terbarukan (non-renewable resources). Sumberdaya terbarukan meliputi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, mineral air laut, air laut dalam, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (ocean thermal energy conversion). Sementara sumber daya tidak terbarukan (non-renewable resources) terdiri dari minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral yang terkandung didalamnya.

Potensi pengembangan budidaya perikanan laut memiliki prospek yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta memiliki sumberdaya berbagai spesies ikan yang bernilai ekonomis penting. Komoditas potensial budidaya laut yang mempunyai daya saing tinggi dan prospektif untuk dikembangkan antara lain ikan tuna sirip kuning, ikan kakap putih, ikan kerapu, abalone, teripang, Kepiting dan lobster. Oleh karena itu, pemantauan mengenai berbagai aspek budidaya beberapa komoditas tersebut perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Prospek pengembangan perikanan sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut serta didukung oleh tersedianya paket teknologi perikanan yang tepat guna. Potensi SDM Penyuluh Perikanan yang tersebar di 4 Provinsi yaitu Bali, NTB, NTT dan Kalimantan tengah merupakan bagian dari perpanjangan tangan yang menjembatani perkembangan teknologi budidaya ikan laut yang dihasilkan oleh BBRBLPP.

Efisiensi Anggaran

Hasil perhitungan efisiensi anggaran BBRBLPP adalah hasil pengukuran yang akan didapatkan pada akhir tahun. Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BBRBLPP yang mengacu pada tahapan BRSDM yaitu :

- 1) Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPSDM dalam beberapa dimensi, yaitu :
 - Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu mengikuti arahan program pusat yakni melakukan kegiatan optimalisasi pemanfaatan asset dengan melaksanakan kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village* (SFV) sesuai dengan porsi anggaran yang diberikan dan tidak melaksanakan kegiatan belanja modal.
 - Dimensi efisiensi kedua berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas dan managerial internal balai melalui pemilihan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dengan penyesuaian berdasarkan komposisi anggaran managerial yang tersedia.
 - Dimensi efisiensi ketiga berupa perhitungan target dan capaian PNBPN yang berasal dari lanjutan kegiatan *Smart Fisheries Village* (SFV) atau optimalisasi aset dengan capaian PNBPN sebesar Rp.251.780.664 atau berkontribusi sebesar 104,3% atas keseluruhan capaian PNBPN BBRBLPP yang targetnya direvisi pada dokumen perjanjian kinerja di tahun 2025. Sebagian besar setoran PNBPN berasal dari kegiatan penjualan telur bandeng, telur kakap, benih kakap, benih kerapu, gelondongan kakap dan kerapu, dan kakap ukuran konsumsi. Disamping itu penerimaan PNBPN pada tahun 2025 ini juga berasal dari pendapatan umum yang termasuk didalamnya dari

penghapusan/ penjualan asset BMN yang sudah rusak, optimalisasi pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, pendapatan rutinitas sewa tanah, Gedung dan bangunan.

- 2) Pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2025 secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, baik kegiatan penyuluhan perikanan, manajerial dan kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village (SFV)* walaupun ada kebijakan efisiensi anggaran di beberapa komponen kegiatan pada DIPA BBRBLPP dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran.
- 3) Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan secara terukur, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan telah menyusun dokumen pelaporan dari beberapa komponen yang harus dilaporkan dan telah melakukan pemantauan, evaluasi terhadap semua kegiatan yang terselenggara selama kurun waktu tahun 2025, baik penyuluhan, manajerial, kerjasama maupun kegiatan lanjutan *Smart Fisheries Village (SFV)*.
- 4) Penyesuaian Berdasarkan realisasi anggaran yang tercatat dari pagu DIPA rupiah murni BBRBLPP telah dilakukan penyesuaian yang terarah berdasarkan tatanan operasional prosedur pengelolaan anggaran APBN dengan terverifikasi 8 (delapan) kali revisi DIPA, sehingga dalam pengadministrasiannya hampir melebihi dari peraturan yang ada, akan tetapi realisasi anggaran dan target capaian kegiatan teridentifikasi baik dan mendapat respon positif berdasarkan catatan aplikasi kinerja.

BAB III.

Permasalahan Dan Rekomendasi

3.1. Permasalahan

Selama tahun anggaran 2025, ada beberapa permasalahan yang di hadapi BBRBLPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah :

1. Nilai PNBP Satker BBRBLPP (Rupiah Milyar) berpotensi tidak tercapai selain karena adanya kebijakan efisiensi anggaran juga disebabkan karena target panen tahap pembesaran tidak dapat terlaksana sampai akhir tahun 2025 karena benih belum mencapai ukuran siap untuk dipanen secara massal.
2. Ketercapaian IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang lulus Penilaian Kompetensi di BBRBLPP terkendala karena:
 - a. Dari 13 orang yang diusulkan untuk ikut Ujikom, terdapat 5 orang tidak bisa mengikuti ujikom disebabkan pendidikannya belum memenuhi syarat yaitu minimal D3;
 - b. Terdapat 1 orang penyuluh telah mengikuti ujikom dan telah lulus tahap I, namun tahap II tidak lulus karena tidak masuk pada perangkan;
 - c. Sisanya sebanyak 6 orang tidak lulus setelah mengikuti ujian dan hanya 1 orang telah lulus.

3.2. Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Menata ulang dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) BBRBLPP atau dengan optimalisasi aset yang belum tergarap, melalui sewa atau kerja sama;
2. Melakukan pendampingan (*coaching/mentoring*), simulasi ujian (*tryout*), dan persiapan portofolio kerja, khususnya kepada karyawan yang akan mengikuti Ujian Kompetensi Penyuluh.

BAB IV.

P e n u t u p

Laporan Tahunan Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target kegiatan maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan terdapat 10 IKU yang capaiannya memiliki kategori istimewa atau tercapai lebih dari 110%, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya, namun BBRBLPP tetap melakukan tuis sesuai dengan arahan dan pendanaan dari pusat. Pada kontrak kinerja terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Semua IKU yang telah ditargetkan mampu direalisasikan 100% bahkan beberapa telah tercapai jauh melebihi ekspektasi Balai pada tahun ini. IKU yang capaiannya tertinggi di tahun 2025 adalah IKU 6. Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BBRBLPP (Paket) dan IKU 9. Kemitraan yang Disepakati dan/ atau Ditindaklanjuti di Satker BBRBLPP (Dokumen) dengan realisasi masing - masing sebesar 200% dari target yang ditetapkan.

Sampai dengan akhir bulan Desember, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan secara optimal berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun ini diharapkan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada tahun – tahun yang akan datang. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang. Sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Balai, masih perlu dilakukan perbaikan sarana dan penambahan sarana selain itu diperlukan dukungan seluruh SDM yang ada dan masyarakat sekitar, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal pada tahun ini sesuai dengan target yang diprogramkan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi BBPPBL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan.



BBRBLPP

Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
Institute for Mariculture Research And Fisheries Extension

*Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Pusat Riset Perikanan
Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
2023*